

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kesehatan adalah suatu keadaan dimana seseorang berada dalam kondisi sehat mampu menjalani kehidupan yang produktif karena berada dalam keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Dalam kapasitasnya sebagai penyedia layanan publik, pemerintah harus bertindak secara profesional dalam melaksanakan kegiatan pelayanan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Layanan publik di sektor kesehatan merupakan fungsi pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan dan menyediakan hak-hak dasar, yang dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai hak untuk menikmati kehidupan yang bermartabat serta hak-hak yang diakui dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Pembuatan kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat merupakan langkah paling krusial dalam mewujudkan hak-hak dasar tersebut.¹

Pemerintah terus menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, karena salah satu alasan mengapa masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan mereka adalah biaya layanan kesehatan dan perawatan medis yang terus meningkat. Selain itu, pemerintah juga berupaya agar

¹ Redjeki, D. S. S. (2020). *Memaknai pentingnya perawatan kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup*. 11(1), 61–78.

biaya kesehatan tidak memberatkan masyarakat dengan membentuk jaminan kesehatan.²

Pemerintah, sebagai penyelenggara negara, memikul tanggung jawab untuk menjamin kesehatan seluruh warganya, di antaranya melalui penyediaan layanan dan fasilitas perawatan kesehatan. Hal ini dimaksudkan agar hak masyarakat atas kesehatan dapat terpenuhi dan mendapatkan perlindungan secara nyata. Ketersediaan pelayanan kesehatan yang memadai merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat sekaligus menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu bangsa.³

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pemerintah kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai bentuk tindak lanjut dari ketentuan tersebut. BPJS dibentuk sebagai badan hukum yang bertugas menyelenggarakan berbagai program jaminan sosial, yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan kematian.

Salah satu langkah yang telah diambil pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memudahkan akses ke layanan kesehatan adalah penerapan program

² Perdana, N. R., Adhasari, G., & Mahadewi, E. P. (2022). Challenges and Implementation of Universal Health Coverage Program in Indonesia. *International Journal of Health and Pharmaceutical*, 2(3), 589–596.

³ Arifin, J. (2023). Peran pemerintah dalam meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit menular. *Jurnal Yustitia*, 9(1), 85–99.

BPJS Kesehatan. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) bertugas mengelola program jaminan kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Sejak Januari 2014, BPJS Kesehatan telah mulai beroperasi.⁴

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang menawarkan perlindungan kesehatan bagi seluruh warga Indonesia, merupakan tujuan utama dari program BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan berupaya meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau melalui sistem jaminan sosial yang dibangun berdasarkan prinsip gotong royong⁵. Selain itu, BPJS Kesehatan berupaya menjamin pengelolaan iuran yang transparan dan berkelanjutan, memberikan jaminan kepada peserta terkait pembiayaan layanan kesehatan, serta turut berperan dalam mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)* agar setiap orang memiliki akses terhadap jaminan kesehatan. Untuk menjamin pelayanan terbaik bagi para peserta, BPJS Kesehatan menerapkan sistem manajemen mutu dan biaya.⁶

Program BPJS diharapkan dapat menjadi program kesehatan yang bisa memberikan jaminan dan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat hingga ke daerah, menurut data dari BPJS Kesehatan, per 14 Juli 2025 jumlah peserta

⁴ Afifah, T. N., Yusrani, K. G., Shabrina, R. S. N., & Istanti, N. D. (2022). *Studi literatur: analisis implementasi kebijakan program bpjs kesehatan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di indonesia*. 2(3), 113–121.

⁵ Sitorus, N., Yusrizal, Y., & Nasution, J. (2023). Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 45–60.

⁶ Anantya, A.R., Saragih, N.C., & Raja, O.L. (2024). Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelayanan Publik.

BPJS Kesehatan telah mencapai angka 280,1 juta jiwa dengan tingkat keaktifan peserta mencapai 77,30% atau sekitar 216,7 juta peserta aktif, dimana 22,7% sisanya atau sekitar 63,4 juta jiwa berstatus tidak aktif karena tunggakan atau mutasi. Angka ini menunjukkan bahwasanya hampir semua masyarakat di Indonesia telah menjadi pengguna BPJS Kesehatan. Berikut data pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia dalam rentang tahun 2022-2024:

Tabel 1. 1
Jumlah Pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia

Tahun	Jumlah Pengguna	Persentase
2022	248,77 juta jiwa	90,34%
2023	267,31 juta jiwa	95%
2024	278,1 juta jiwa	98,45%
2025	278,9 juta jiwa	98,89%

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia yang diolah peneliti, 2025.

Berdasarkan data di atas dapat kita lihat bahwasanya dari tahun ke tahun pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun kondisi ini menyisakan pertanyaan implementatif jika tidak diimbangi dengan pelayanan yang baik tentu dengan banyak nya masyarakat yang menggunakan bisa terjadi masalah seperti dalam kualitas pelayanan yang dimana banyak ditemukan kasus lambat nya pelayanan untuk pengguna BPJS yang banyak beredar di sosial media.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 28H Undang-Undang Dasar, pemerintah daerah diwajibkan untuk menangani layanan dasar atau isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan. Akibatnya, setiap warga negara di Indonesia berhak atas perlindungan kesehatan, termasuk keluarga dan masyarakat. Agar masyarakat dapat sejahtera, pemerintah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah di sektor kesehatan untuk mengembangkan kapasitas di sejumlah bidang, termasuk komitmen masyarakat dan para pemimpin dalam meningkatkan kesehatan, sistem kesehatan, administrator kesehatan, pendanaan yang memadai, fasilitas, dan infrastruktur.⁷

Jaminan kesehatan juga berkaitan dengan kemiskinan, dengan mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah tentu akan sangat membantu masyarakat miskin dalam pembiayaan kesehatan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak. BPS Kota Padang mencatat tingkat kemiskinan di Kota Padang pada tahun 2024 sebesar 4,06%, untuk membantu masyarakat miskin dalam mendatkan jaminan kesehatan, dibentuk lah program Penerima Bantuan Iuran (PBI), program ini memiliki peran krusial dalam menekan tanggungan *outcome* penduduk kurang mampu di Kota Padang yang juga merupakan salah satu dari misi Pemerintah Kota Padang untuk mengurangi kemiskinan.

⁷ Paska, H. (2023). Upaya pemerintah indonesia dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan di pedesaan terkait undang-undang kesehatan. *Magistra Law Review*, 4(01), 11–11.

Dorongan tersebut yang kemudian membuat pemerintah Kota Padang merancang program yang membantu masyarakat agar dapat mengakses pelayanan kesehatan secara gratis. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Kota Padang tahun 2025 ini yaitu “Padang menuju kota pintar dan sehat berlandaskan agama dan budaya”. Pemerintah Kota Padang telah membentuk sembilan program unggulan yaitu Padang Melayani, Padang Juara, Smart Surau, Sinergi Nagari, Padang Amanah, Padang Sigap, Padang Rancak, Padang Sigap, UMKM Naik Kelas, dan Jelajah Padang.

Program unggulan Padang Melayani memiliki beberapa program yang berfokus di bidang pelayanan publik dan salah satu nya adalah program pembiayaan BPJS⁸. Program lain nya yang juga termasuk dalam program Padang Melayani diantara nya adalah BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, bantuan bagi kelompok pertanian dan perikanan, dokter warga, peduli warga emas, fasilitas/intensif keluarga pasien kurang mampu, izin investasi dan usaha, serta perlindungan anak dan perempuan terhadap kekerasan.

Kota Padang memiliki jumlah persentase pengguna jaminan kesehatan yang termasuk tinggi dan selalu mengalami peningkatan pengguna jaminan kesehatan dalam kurun waktu beberapa tahun ke belakang, berikut data masyarakat Kota Padang yang sudah memiliki jaminan kesehatan dalam rentang tahun 2022-2024:

⁸ Emil Mahmud. (2025). Fadly Amran Uraikan 9 Program Unggulan Untuk Kejayaan Kota Padang. Diakses pada 26 Februari 2026 dari [Fadly Amran Uraikan 9 Program Unggulan Untuk Kejayaan Kota Padang - Tribunpadang.com](https://tribunpadang.com)

Tabel 1. 2
Jumlah Pengguna Jaminan Kesehatan di Kota Padang

Tahun	Persentase	Jumlah
2022	95.04%	919.921
2023	95,15%	920.432.
2024	97,2%	932.763
2025	98%	939.851

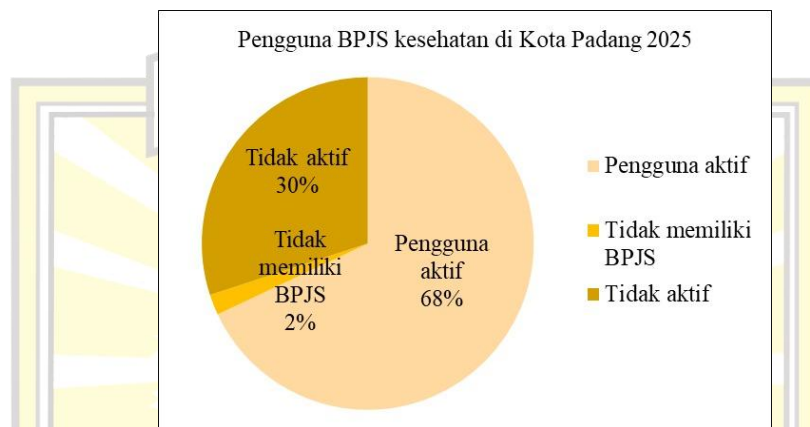
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang yang diolah peneliti, 2025.

Melihat pada tabel diatas, terjadi kenaikan persentase jumlah masyarakat yang sudah memiliki jaminan kesehatan di Kota Padang, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Padang sadar akan pentingnya memiliki jaminan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang layak dan sejalan dengan implementasi program pembiayaan BPJS Padang Melayani agar bisa membantu dan menjamin kesehatan masyarakat di Kota Padang.

Penelitian ini berangkat dari banyak nya masyarakat Kota Padang yang menunggak pembayaran BPJS kesehatan. Tinggi nya angka masyarakat Kota Padang yang telah mempunyai jaminan kesehatan ternyata tidak diimbangi dengan ke aktifan masyarakat Kota Padang dalam membayar iuran. Jika di lihat dari data Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2025, sudah terdapat 939.851 atau sekitar 98% masyarakat Kota Padang sudah memiliki jaminan kesehatan, tetapi sebanyak 217.406 atau sekitar 30% diantara nya tercatat sebagai peserta tidak aktif, 68% lain nya atau

sebanyak 722.445 masyarakat tergolong aktif dan sisanya 2% adalah masyarakat Kota Padang yang belum memiliki jaminan kesehatan, seperti dalam diagram berikut:

Gambar 1. 1
Pengguna BPJS Kesehatan di Kota Padang Tahun 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang yang diolah peneliti, 2026.

Program BPJS gratis Padang Melayani lahir karena banyak nya masyarakat Kota Padang yang menunggak pembayaran BPJS kesehatan, disamping itu Wali Kota Padang Fadly Amran juga ingin mewujudkan masyarakat Kota Padang yang terjamin kesehatan nya, dan salah satu langkah nya adalah dengan membentuk program ini untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mencakup keseluruhan elemen masyarakat dan membantu masyarakat dalam pembiayaan jaminan kesehatan yang tidak aktif.⁹

⁹ IKP Diskominfo Kota Padang. 2025. Ternyata Ini Latar Belakang Fadly-Maigus Cetuskan Program BPJS Gratis Bagi Warganya. Diakses pada 15 Desember 2025 dari <https://padang.go.id/berita/ternyata-ini-latar-belakang-fadly-maigus-cetuskan-program-bpjs-gratis-bagi-warganya>

Tinggi nya angka jaminan kesehatan di Kota Padang dan telah dibentuk nya program Padang Melayani tentu menyisakan pertanyaan implementatif apakah semua kelompok sasaran dapat terlayani dengan baik atau tidak, dan berpotensi menimbulkan masalah baru seperti bagaimana kapasitas pelaksana dapat memberikan pelayanan terhadap banyak nya masyarakat yang akan memanfaatkan program ini.

Program ini menyediakan BPJS Kesehatan gratis bagi warga Kota Padang yang memenuhi kriteria, khususnya pekerja bukan penerima upah atau bukan pekerja yang tidak mampu. Warga harus terdaftar sebagai penduduk Kota Padang yang dibuktikan dengan KTP, KK, atau surat keterangan domisili dari kelurahan. Dalam implementasi nya, jika tidak darurat pasien harus mengurus surat rujukan dari kelurahan dan puskesmas terlebih dahulu, tetapi jika keadaan darurat pasien bisa langsung ke IGD dan wajib lapor ke kelurahan keesokan harinya untuk mengurus administrasi. Masyarakat yang dapat memanfaatkan program ini diantaranya adalah warga Kota Padang dengan bukti yang terlampir dan bagi peserta BPJS mandiri yang menunggak.¹⁰

Berikut kriteria masyarakat Kota Padang yang dapat memanfaatkan program pembiayaan BPJS Padang Melayani:

¹⁰ Antoro, Tri. 2025. Jaminan Kesehatan Gratis Padang Melayani Hadir Untuk Warga. Diakses pada 28 Desember 2025 dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/909991/jaminan-kesehatan-gratis-padang-melayani-hadir-untuk-warga>

Tabel 1. 3
Kriteria Penerima Program Jaminan Kesehatan

No	Pemenuhan Kepesertaan	Kriteria
1.	Berdasarkan domisili asli Kota Padang	a. Peserta pekerja bukan penerima upah/bukan pekerja yang didaftarkan oleh pemerintah daerah b. Berdomisili di Kota Padang sebelum keputusan ini ditetapkan yang dibuktikan dengan KTP/KK/surat keterangan domisili dari kelurahan setempat c. Membutuhkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan kegawatdaruratan medis dan/atau memerlukan tindakan segera yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit d. Membutuhkan layanan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari puskesmas e. Memperoleh surat keterangan membutuhkan jaminan kesehatan yang dikeluarkan oleh Lurah
2.	Berdasarkan non domisili asli Kota Padang	a. Warga yang telah berdomisili di Kota Padang paling singkat 2 tahun berturut-turut sejak program dijalankan, yang dibuktikan dengan KK dan/atau surat keterangan domisili dari kelurahan setempat
		b. Warga yang termasuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diterbitkan oleh pemerintah tahun sebelumnya.

Sumber: SK Wali Kota Padang Nomor 321 Tahun 2025

Program pembiayaan BPJS kesehatan merupakan program unggulan yang sepenuhnya bersumber dari dana APBD dan ditujukan untuk warga yang benar-benar membutuhkan. Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Padang mengucurkan dana sebesar

Rp.11.135.539.800 atau sekitar 9% dari total APBD Kota Padang di tahun itu, anggaran ini di tingkatkan lagi di tahun 2026 sebesar 36.206.352.000.¹¹ Hal ini selaras dengan pernyataan dari narasumber yaitu Lisa yang menjabat sebagai jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang saat ini, dalam wawancara beliau menyatakan:

“Anggaran untuk program BPJS gratis Padang Melayani yang di laksanakan oleh pemerintah Kota Padang saat ini semua nya berumber dari APBD Kota Padang dan tidak ada bantuan dari pihak manapun, jadi ini memang di peruntukkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.” (Wawancara bersama jabatan fungsional ahli muda bidang sumber daya kesehatan Dinas Kesehatan Kota Padang tanggal 24 Desember 2025).

Hasil wawancara diatas tentu menimbulkan pertanyaan baru, bagaimana anggaran APBD dapat memenuhi semua kebutuhan dalam program ini dan bagaimana keberlanjutan fiskal APBD Kota Padang kedepan nya setelah program ini berjalan karena semua kebutuhan dari program ini dibeban kan kepada APBD Kota Padang.

Implementasi program pembiayaan BPJS kesehatan Padang Melayani ini juga bekerjasama dengan rumah sakit yang ada di Kota Padang, baik itu rumah sakit negeri ataupun swasta. Hal ini tentu memudahkan masyarakat Kota Padang dalam mengakses program ini, karena semua rumah sakit yang ada di Kota Padang telah mendukung keberlangsungan program ini. Kerja sama ini diharapkan dapat

¹¹ Wawancara dengan Pejabat Fungsional Adminkes Ahli Muda Dinas Kesehatan Kota Padang Pada Tanggal 24 Desember 2025.

memberikan pelayanan prima kesehatan masyarakat, karena BPJS merupakan badan hukum publik yang diawasi oleh banyak pihak sehingga seluruh rumah sakit harus benar-benar memberikan pelayanan terbaik.

Selain 24 puskesmas di Kota Padang yang tersebar di 11 Kecamatan, juga terdapat 24 rumah sakit termasuk di dalam nya rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan program ini di Kota Padang, diantara nya:

Tabel 1. 4
Daftar Rumah Sakit dan Puskesmas Yang Bekerja Sama Dengan Program
Padang Melayani

A). Rumah Sakit

1	RS Jiwa Prof HB Saanin Padang	13.	RSIA Restu Ibu
2.	RS Universitas Andalas	14.	RSUP DR M Djamil Padang
3.	RSIA Lenggogeni	15.	RS Jiwa Dr Yaunin
4.	RSK Bedah Roponasuri Padang	16.	RSIA Siti Hawa Padang
5.	RSIA Cicik Padang	17.	RSIA Mutiara Bunda Padang
6.	Semen Padang Hospital	18.	RS Yos Sudarso
7.	RSU Bunda Padang	19.	RS Aisyiyah Padang
8.	RSKM Regina <i>Eye Center</i>	20.	RUMKITAL Dr dr Tarmizi Taher
9.	Reksodiwiryono Padang	21.	RS Hermina Padang
10.	RS Naili DBS Padang	22.	RS Khusus Bedah Kartika Docta Padang
11.	RS Dr Rasidin Padang	23.	RS Siti Rahmah
12.	RSI Ibnu Sina	24.	RS Mata Padang <i>Eye Center</i>

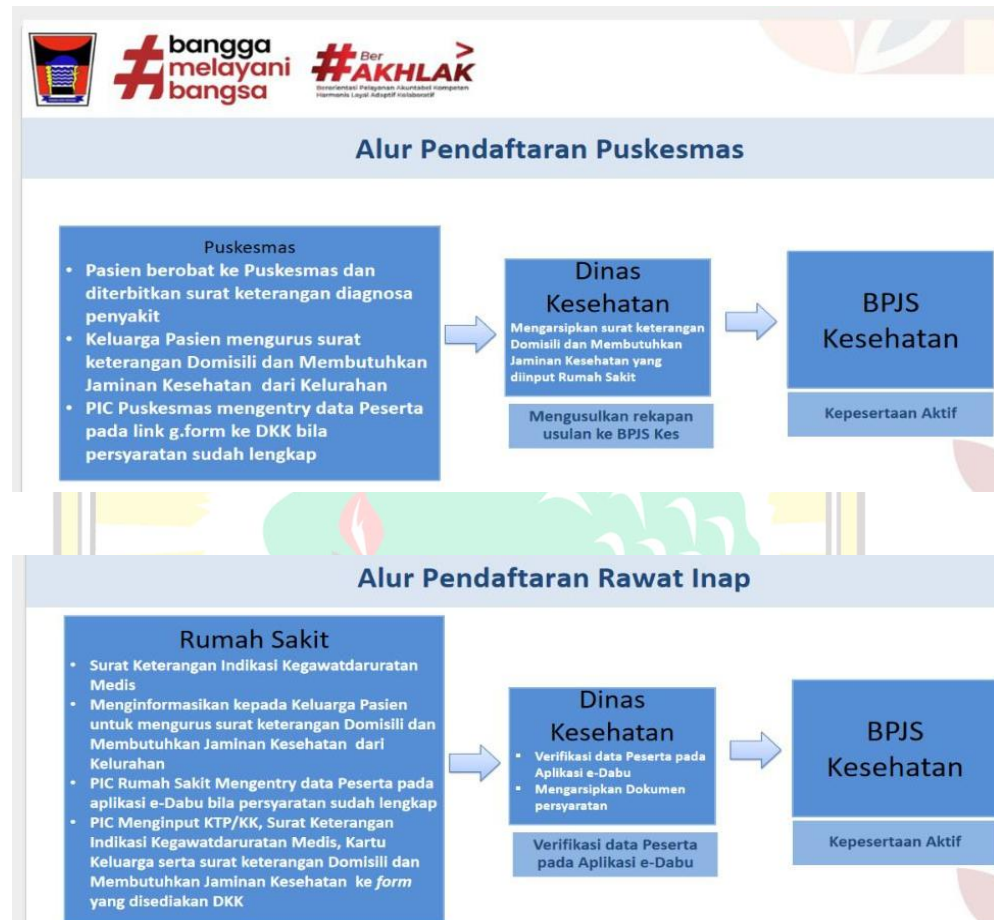
B). Puskesmas

1.	Puskesmas Parak Karakah	9.	Puskesmas Nanggalo	17.	Puskesmas Rawang
2.	Puskesmas Dadok Tunggul Hitam	10.	Puskesmas Koto Panjang Ikua Koto	18.	Puskesmas Pemancangan
3.	Puskesmas Anak Air	11.	Puskesmas Lubuk Buaya	19.	Puskesmas Seberang Padang
4.	Puskesmas Pauh	12.	Puskesmas Alai	20.	Puskesmas Pengambiran
5.	Puskesmas Ambacang	13.	Puskesmas Air Tawar	21.	Puskesmas Lubuk Begalung
6.	Puskesmas Kuranji	14.	Puskesmas Ulak Karang	22.	Puskesmas Lubuk Kilangan
7.	Puskesmas Belimbing	15.	Puskesmas Padang Pasir	23.	Puskesmas Bungus
8.	Puskesmas Lapai	16.	Puskesmas Andalas	24.	Puskesmas Air Dingin

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang yang diolah peneliti, 2025.

Data diatas menunjukkan bahwasanya program BPJS gratis Padang Melayani juga mendapatkan dukungan dari banyak rumah sakit yang ada di Kota Padang, hal ini langsung di instruksikan oleh Wali Kota Padang Fadly Amran saat peresmian dimulai nya program ini. Bagi masyarakat Kota Padang yang ingin memanfaatkan program ini baik di puskesmas maupun rumah sakit dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut:

Gambar 1. 2
Alur Pemanfaatan Program Pembiayaan BPJS Padang Melayani



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang

Berdasarkan gambar diatas, bagi masyarakat yang berobat ke Puskesmas dengan membawa *photocopy* kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat domisili yang di minta ke kelurahan. Terdapat dokumen tambahan yang akan dikeluarkan oleh Puskesmas yaitu surat kegawatdaruratan. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan di rekap oleh pihak Puskesmas dan dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Padang melalui *form* yang telah disediakan oleh Dinas Kesehatan,

yang nanti nya Dinas Kesehatan Kota Padang akan memverifikasi data sebelum diteruskan ke BPJS kesehatan sehingga masyarakat yang berobat mendapatkan pelayanan kesehatan gratis (rawat jalan).

Alur pelayanan di rumah sakit memiliki perbedaan dengan puskesmas, tidak hanya rawat jalan, di rumah sakit masyarakat bisa mendapatkan pelayanan rawat inap, untuk persyaratan dokumen tetap sama dengan Puskesmas, perbedaan lain nya adalah tugas dari pihak rumah sakit dan Puskesmas. Puskesmas merekap data dokumen lalu di teruskan ke Dinas Kesehatan melalui *form*, sedangkan pihak rumah sakit akan mengirimkan dokumen langsung ke BPJS melalui aplikasi *E-Dabu* yang dibentuk oleh BPJS sehingga masyarakat yang berobat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis.

Selama program ini berjalan, masyarakat yang telah menggunakan program ini kedepan nya akan terdaftar menjadi peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang ditanggung penuh pembayaran iuran per bulan yang berasal dari APBD Kota Padang. Bagi masyarakat yang memanfaatkan program ini untuk kedua kali nya, cukup dengan membawa persyaratan KK dan KTP.

Dalam implementasi nya, program pembiayaan BPJS Padang Melayani didasari pada Keputusan Wali Kota Padang Nomor 321 Tahun 2025, dalam keputusan tersebut telah ditetapkan kriteria penerima manfaat dari program ini dan merupakan perwujudan dari janji kampanye Wali Kota Padang yaitu Fadly Amran

sebelumnya. Sejak peluncuran awal, saat ini sudah lebih dari 30.000 warga Kota Padang telah memanfaatkan layanan BPJS gratis ini, hal tersebut dicapai setelah sebelumnya pemerintah Kota Padang terus melakukan sosialisasi dan pendataan ulang secara massif yang melibatkan unsur RT/RW dan dinas kesehatan, agar seluruh warga yang berhak bisa terdaftar dan mendapatkan layanan.

Banyak nya masyarakat yang memanfaatkan program ini selaras dengan wawancara yang di lakukan oleh peneliti bersama Lisa selaku jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang Desember lalu:

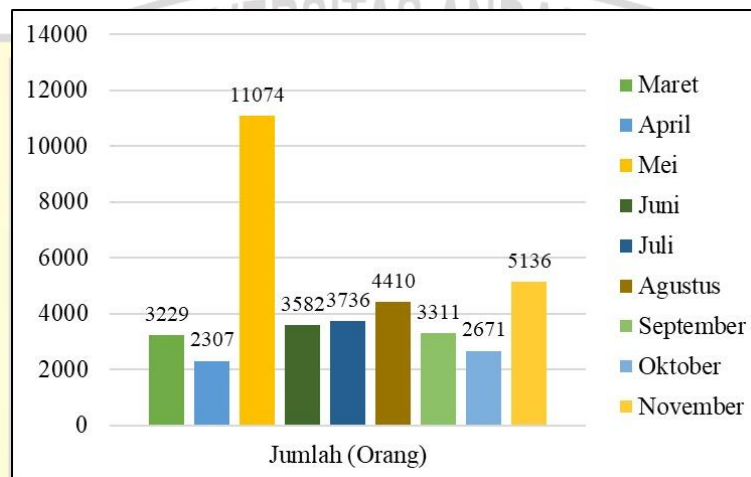
“Sejak diluncurkan nya program BPJS gratis ini banyak sekali masyarakat Kota Padang yang langsung memanfaatkan program ini, dalam data kami setiap bulan nya sekitar tiga ribu masyarakat yang memanfaatkan program ini, dan hingga Novermber 2025 ini sudah ada lebih dari tiga puluh ribu masyarakat Kota Padang yang telah menggunakan.” (Wawancara bersama jabatan fungsional ahli muda bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang pada tanggal 24 Desember 2025)

Dengan banyak nya masyarakat yang memanfaatkan program ini belum bisa dikatakan bahwa program ini berjalan dengan baik, hal ini justru dapat memicu tantangan dan masalah baru khusus nya bagi petugas di lapangan, apakah sumber daya masyarakat sebagai implementor tercukupi dengan beban yang besar dan bagaimana fasilitas yang tersedia dapat menampung banyak nya masyarakat yang memanfaatkan program ini.

Selama pelaksanaan program yang telah dimulai dari bulan Maret 2025, masyarakat sangat antusias dalam memanfaatkan program ini, hal ini dapat dilihat

dari angka masyarakat yang memanfaatkan program ini mulai dari Maret - November 2025 sebagai berikut:

Gambar 1. 3
Jumlah Masyarakat Kota Padang yang Memanfaatkan Program Pembiayaan BPJS di Bulan Maret-November 2025



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang yang diolah peneliti, 2025

Data Dinas Kesehatan menunjukkan kenaikan yang signifikan yang terjadi pada bulan Mei 2025, hal tersebut dikarenakan penambahan kriteria masyarakat yang dapat memanfaatkan program pembiayaan BPJS gratis yang ada di tabel 1.3 poin kedua yaitu masyarakat yang sudah berdomisili paling singkat selama dua tahun berturut-turut di Kota Padang dan juga masyarakat yang termasuk ke dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diterbitkan oleh pemerintah tahun sebelumnya.

Kota Padang total memiliki 11 Kecamatan yang terbagi menjadi 104 Kelurahan. Hingga November 2025, Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan

dengan jumlah masyarakat paling tinggi yang memanfaatkan program ini, dan Kecamatan Nanggalo menjadi kecamatan dengan jumlah masyarakat paling rendah yang memanfaatkan program ini, berikut rincian data setiap Kecamatan di Kota Padang dan per kelurahan yang ada di masing-masing kecamatan tertinggi dan terendah sampai November 2025:

Tabel 1. 5
Daftar Kecamatan dan Jumlah Pengguna Program Maret-November 2025

Kecamatan	Jumlah
Bungus Teluk Kabung	1214
Koto Tangah	9881
Kuranji	4768
Lubuk Begalung	3690
Nanggalo	1199
Padang Barat	1271
Padang Selatan	3079
Padang Timur	1958
Padang Utara	1310
Pauh	3697

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

Tabel diatas menunjukkan jumlah pengguna program pembiayaan BPJS kesehatan pada masing-masing kecamatan yang ada di Kota Padang pada periode Maret-November 2025. Kecamatan Koto Tangah menjadi kecamatan dengan jumlah pengguna paling tinggi dan Kecamatan nanggalo menjadi kecamatan dengan jumlah

pengguna terendah di Kota Padang, berikut rincian per kelurahan dari dua kecamatan tersebut:

Gambar 1. 4
Jumlah Kecamatan Tertinggi dan Terendah Yang Memanfaatkan Program

Koto Tengah	Aia Pacah	666
	Balai Gadang	1527
	Batang Kabung Ganting	320
	Batipuh Panjang	833
	Bungo Pasang	470
	Dadok Tunggul Hitam	1080
	Koto Panjang Ikur Koto	1222
	Koto Pulai	259
	Lubuk Buaya	736
	Lubuk Minturun	499
	Padang Sarai	1523
	Parupuk Tabing	352
	Pasie Nan Tigo	394
	JUMLAH	9881
Nanggalo	Gurun Laweh	84
	Kampung Lapai	153
	Kampung Olo	168
	Kurao Pagang	404
	Surau Gadang	296
	Tebing Banda Gadang	94
	JUMLAH	1199

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Padang, 2025

Banyak nya masyarakat yang memanfaatkan program ini tidak sebanding dengan kapasitas organisasi pelaksana di lapangan. Peneliti menemukan permasalahan yang menyangkut organisasi pelaksana dengan melihat kapasitas organisasi pelaksana di Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam implementor dalam program ini, saat melakukan wawancara dengan

narasumber Nila selaku jabatan fungsional bidang sumber daya kesehatan di dinas kesehatan Kota Padang beliau menyampaikan:

“Dinas Kesehatan Kota Padang hanya memiliki dua orang admin untuk merekap keseluruhan data dari puskesmas untuk dikirim ke BPJS, dalam setiap bulan nya rata-rata hampir mencapai empat ribu data yang harus di verifikasi dan di rekap, seharusnya rekap data dikirimkan ke BPJS setiap harinya, akan tetapi karena setiap harinya banyak terkadang rekap kami kirimkan dalam dua hari.” (Wawancara dengan jabatan fungsional ahli muda bidang sumber daya kesehatan di Dinas Kesehatan Kota Padang pada tanggal 20 Januari 2026)

Hasil wawancara di atas menjelaskan permasalahan kurang tercukupi nya sumber daya manusia sebagai penunjang dalam implementasi program. Verifikasi data yang lambat berdampak kepada aktivasi BPJS masyarakat yang ikut tertunda pada hari dimana masyarakat memanfaatkan program pembiayaan BPJS untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Permasalahan lain adalah *form* yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan sering mengalami eror saat Puskesmas akan mengirimkan data masyarakat.

Program ini merupakan sebuah model pelayanan kesehatan publik yang mengedepankan inklusivitas dan mudahnya akses masyarakat dalam menerima pelayanan dan jaminan kesehatan yang baik. Program pembiayaan BPJS ini juga dapat menjadi contoh penerapan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung terpenuhinya kebutuhan kesehatan masyarakat yang tanpa biaya. Tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi program ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga Kota Padang kedepannya.

Penelitian ini dilakukan karena peneliti tertarik dengan program yang diambil pemerintah Kota Padang dalam menjamin kesehatan warga nya. Program ini adalah inovasi dari pemerintah daerah dalam menjamin kesehatan masyarakat daerah yang bersumber sepenuhnya dari APBD, program jaminan kesehatan umumnya berskala nasional dan pemerintah Kota Padang mengambil langkah ini sebagai inovasi program di lingkup daerah.

Tinggi nya antusiasme masyarakat yang memanfaatkan program ini tentu memiliki potensi hambatan administratif dalam pelaksanaan nya. Hal penting lain nya adalah dengan melihat bagaimana kapasitas pelaksana di tingkat kelurahan dan rumah sakit yang berpotensi tidak dapat memberikan pelayanan dengan baik karena tingginya angka masyarakat yang memanfaatkan program ini, sehingga diperlukan koordinasi antar sektor pelaksana agar program ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pertanyaan implementatif lain nya yang muncul adalah bagaimana keberlanjutan fiskal APBD Kota Padang dalam memenuhi kebutuhan anggaran selama program ini berlangsung yang tentu berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam APBD jika tidak di kelola dengan benar dan dapat mengancam sektor lain nya dalam pembangunan Kota Padang.

Meskipun secara kuantitatif program pembiayaan BPJS Padang Melayani menunjukkan tingkat pemanfaatan yang tinggi dan didukung oleh berbagai fasilitas

kesehatan, namun keberhasilan kebijakan publik tidak hanya diukur dari capaian angka kepesertaan dan pemanfaatan layanan. Implementasi kebijakan juga ditentukan oleh kesesuaian antara desain program, kapasitas pelaksana, serta kemampuan kelompok sasaran dalam mengakses layanan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi Program BPJS Gratis Padang Melayani dilaksanakan di Kota Padang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan pembiayaan BPJS kesehatan melalui program Padang Melayani sebagai program unggulan Kota Padang tahun 2025?.

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menjelaskan bagaimana kebijakan pembiayaan BPJS Kesehatan diterapkan melalui program “Padang Melayani”, yang merupakan program unggulan Kota Padang untuk tahun 2025 dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Padang guna menjamin layanan kesehatan bagi masyarakat Padang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Secara Akademis

1. Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sudut pandang baru dan, tentu saja, turut mendukung kemajuan administrasi publik, terutama bagi para mahasiswa yang mengikuti program tersebut. Analisis kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah, akan menjadi fokus utama penelitian ini.
2. Diharapkan temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada para pembaca dan berfungsi sebagai panduan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

1.4.2. Secara Praktis

1. Secara praktis diharapkan kajian ini bisa membantu memberikan pemahaman mengenai pentingnya jaminan kesehatan dalam menjamin dan memberikan pelayanan kesehatan yang layak, dengan adanya BPJS Kesehatan sebagai jaminan kesehatan diharapkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia bisa mendapatkan kesejahteraan kesehatan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kumpulan informasi mengenai skema pembiayaan BPJS Padang Melayani serta cara pelaksanaannya.